BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

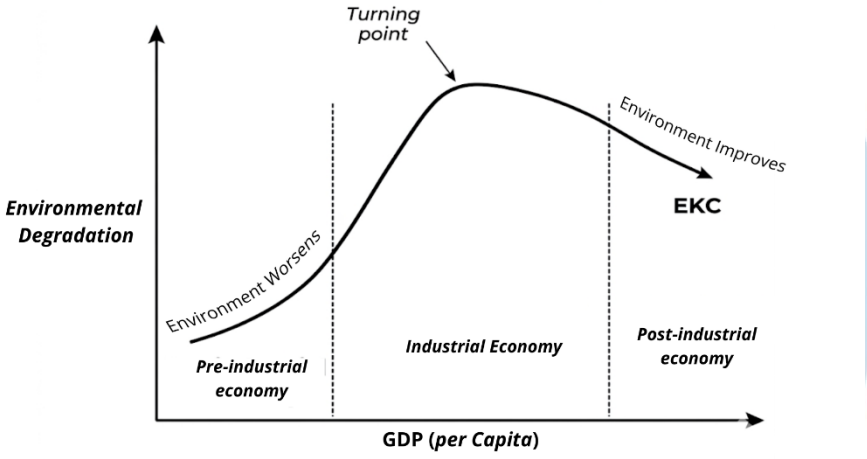
2.1.1. Teori Kelembagaan

Teori kelembagaan (*institutional theory*) menekankan bahwa institusi merupakan elemen fundamental yang membentuk interaksi sosial dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Menurut North (1990), institusi didefinisikan sebagai "*rules of the game*", yaitu batasan yang diciptakan untuk mengatur dan membentuk interaksi manusia (Dau et al., 2022). Selain itu, North (1990) juga mengatakan bahwa institusi berfungsi sebagai aturan main di mana organisasi bertindak sebagai "pemain" yang dibatasi oleh aturan formal maupun informal yang ada di dalamnya (Mcdowell et al., 2012).

Dalam konteks pembangunan, khususnya kinerja lingkungan, kualitas institusi menjadi faktor yang sangat penting karena institusi yang berkualitas tinggi mampu menciptakan ekosistem yang memungkinkan seluruh pihak menjalankan perannya secara efektif dalam perlindungan lingkungan (Li et al., 2022). Institusi yang kuat tidak hanya menetapkan aturan, tetapi juga memastikan implementasi dan kepatuhan terhadap kebijakan yang telah dirumuskan. Sebaliknya, kelemahan institusi dapat menghambat efektivitas kebijakan serta meningkatkan risiko terjadinya degradasi lingkungan. Oleh karena itu, teori kelembagaan memberikan landasan konseptual yang penting dalam menjelaskan bagaimana kualitas tata kelola memengaruhi hasil pembangunan, termasuk kinerja lingkungan.

2.1.2. Teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC)

Environmental Kuznets Curve (EKC) merupakan teori yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan. Grossman & Krueger (1991) menyatakan bahwa hubungan tersebut berbentuk kurva U terbalik, di mana pada tahap awal pembangunan ekonomi, peningkatan pendapatan sering diikuti oleh meningkatnya degradasi lingkungan. Namun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu, kualitas lingkungan cenderung membaik karena meningkatnya kesadaran lingkungan serta perkembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan.



Gambar 2.1 *Environmental Kuznets Curve*

Sumber: Ilustrasi penulis berdasarkan teori EKC (Grossman & Krueger, 1991)

Hubungan kurva U terbalik ditunjukkan pada Gambar 1. Pada tahap awal pembangunan, industrialisasi dan urbanisasi mendorong eksploitasi sumber daya alam serta menghasilkan limbah industri dan perkotaan, sehingga pertumbuhan ekonomi dan pencemaran lingkungan cenderung bergerak secara positif (Rashid Gill et al., 2018). Namun pada tahap pembangunan yang lebih maju, negara

memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengembangkan teknologi yang bersih serta memperkuat kebijakan lingkungan yang berkelanjutan (Wang et al., 2024).

2.2. Penelitian Terdahulu

Dalam upaya meningkatkan kinerja lingkungan, kualitas tata kelola pemerintahan memegang peranan krusial (Handoyo, 2024). Sejalan dengan itu, Bambi et al., (2024) menekankan bahwa berbagai kajian kelembagaan menunjukkan pentingnya institusi yang kuat sebagai penopang utama tata kelola lingkungan yang efektif, sedangkan kelembagaan yang lemah cenderung mempertahankan praktik yang merusak lingkungan. North (1990) mengatakan bahwa lembaga yang efektif menghentikan pelanggaran lingkungan melalui kemampuannya untuk mendeteksi dan menuntut pelanggaran lingkungan secara adil (Toufique, 2025). Maka dari itu, untuk menilai sejauh mana kualitas kelembagaan tersebut, salah satu indikator yang dapat digunakan adalah *Regulatory Quality Index* (RQI), yang merefleksikan kemampuan pemerintah merumuskan dan menegakkan kebijakan dan regulasi yang baik (World Bank, 2025). Berdasarkan Dokuzoğlu & Güzel (2024), efektivitas kebijakan lingkungan sangat bergantung pada kualitas kelembagaan, karena tata kelola pemerintahan yang kuat meningkatkan kemampuan negara dalam merancang, menegakkan, dan mengimplementasikan regulasi lingkungan secara konsisten.

Di samping faktor kelembagaan, pertumbuhan ekonomi juga dipandang memiliki keterkaitan yang erat dengan kualitas lingkungan. Salah satu kerangka yang umum digunakan adalah *Environmental Kuznets Curve* (EKC), yang pertama kali diperkenalkan oleh Grossman & Krueger (1995). Teori ini menyatakan bahwa

degradasi lingkungan cenderung meningkat pada tahap awal pembangunan ekonomi sebelum akhirnya menurun setelah mencapai tingkat pendapatan tertentu. Namun, bukti empiris menunjukkan bahwa pola ini bersifat kontekstual dan sangat bergantung pada tingkat pembangunan suatu negara. Dengan menggunakan *ecological footprint* sebagai indikator degradasi lingkungan, Almulhim et al., (2025) menemukan bahwa hipotesis EKC hanya terbukti pada negara berpendapatan menengah atas dan tinggi, sementara pada negara berpendapatan rendah, pertumbuhan ekonomi secara konsisten justru meningkatkan tekanan terhadap lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa transisi menuju peningkatan kualitas lingkungan tidak semata-mata ditentukan oleh pertumbuhan pendapatan, melainkan oleh kapasitas suatu negara dalam mengadopsi teknologi yang efisien energi dan berbasis energi terbarukan, yang umumnya baru berkembang pada tahap pembangunan ekonomi yang lebih maju serta didukung oleh tata kelola yang efektif.

Faktor pendidikan juga menjadi variabel penting dalam menjelaskan kinerja lingkungan. Berangkat dari teori modal manusia dari Becker (1993), pendidikan dipandang mampu meningkatkan produktivitas dan inovasi. Sehingga hal ini dapat mendorong adopsi teknologi hijau. Selain itu, Harring et al., (2020) melalui bukti empirisnya menunjukkan bahwa pendidikan tinggi berkorelasi positif dengan norma dan dukungan terhadap kebijakan lingkungan, khususnya melalui pembentukan kesadaran dan norma lingkungan (*higher education affects environmental policy support*). Studi tersebut menegaskan bahwa pendidikan

membentuk norma pro-lingkungan yang kemudian meningkatkan preferensi individu terhadap kebijakan yang mendukung perlindungan lingkungan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa kinerja lingkungan dipengaruhi oleh kombinasi faktor kelembagaan, pertumbuhan ekonomi, dan pendidikan. Namun, sebagian besar bukti empiris yang ada masih menilai kualitas lingkungan dengan menggunakan indikator spesifik yang terutama berfokus pada dimensi perubahan iklim, khususnya emisi CO_2, sebagaimana digunakan dalam studi oleh Saba et al., (2025) dan Hamrouni et al., (2025). Meskipun pendekatan ini memberikan wawasan penting mengenai tekanan karbon dan dinamika emisi, pendekatan tersebut belum sepenuhnya mampu merepresentasikan aspek lain dari kualitas lingkungan, seperti kesehatan lingkungan, kondisi ekosistem, serta efektivitas kebijakan lingkungan secara agregat. Selain itu, sebagian besar literatur berfokus pada negara maju atau kelompok negara tertentu, sebagaimana dalam penelitian yang dilakukan oleh Fatima et al., (2024), Nguyen et al., (2025), dan Alam et al., (2025), sehingga dinamika khas negara berpendapatan menengah atas (*upper-middle-income countries*/UMICs) yang sedang mengalami transisi struktural menuju tingkat pembangunan yang lebih tinggi masih relatif kurang dieksplorasi. Oleh karena itu, diperlukan suatu pendekatan yang memungkinkan penilaian kinerja lingkungan secara lebih komprehensif dalam konteks UMICs, guna memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan lingkungan dalam proses pembangunan.